

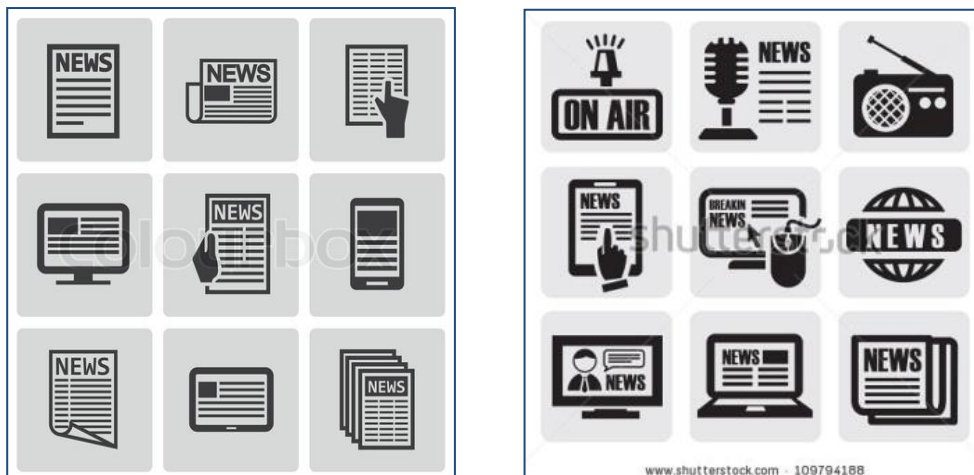


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

## **e-Newspaper Media Online**

Sarana & Prasarana

Senin, 28 Januari 2019



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan  
Jakarta, Bappenas  
2019**

## **Daftar Isi**

1. REALISASI PEMBANGUNAN DIEVALUASI (*Media Online Kompas*)
2. MEMBANGUN PROYEK UNTUK BAHAN BAKAR GAS (*Media Online Republika*)

# KOMPAS

Senin

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

28 Januari 2019

## INFRASTRUKTUR

### Realisasi Pembangunan Dievaluasi

**JAKARTA, KOMPAS** — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengevaluasi 20 program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Hasilnya, 9 program diyakini tercapai sampai akhir 2019, sedangkan 8 program perlu kerja keras untuk menyelesaikannya. Adapun 3 program lain, yakni pengurangan angka kekurangan rumah, penyediaan akses air minum, dan sanitasi, diyakini sulit tercapai, antara lain, karena kendala mahalannya harga tanah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, akhir pekan lalu, menyatakan, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan target.

Program yang dipastikan tercapai, antara lain, adalah pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan tol, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan 49 bendungan. Hingga

akhir 2018, 3.432 kilometer (km) jalan telah dibangun dari rencana 2.650 km. Untuk jalan tol, 782 km telah beroperasi dari target 1.060 km. Pemerintah bahkan menambah target rencana jalan tol beroperasi menjadi 1.852 km. Demikian pula untuk pembangunan 49 bendungan baru menyisakan 9 bendungan yang direncanakan mulai dibangun tahun ini.

Sementara itu, ada 8 program yang harus dilaksanakan dengan kerja keras jika hendak mencapai target. Program itu, antara lain, pembangunan jaringan irigasi tambak dan pengentasan kawasan kumuh dengan target 0 persen kawasan kumuh.

Tiga program dinilai sulit diselesaikan tahun ini, antara lain pengurangan angka kekurangan rumah (*backlog*) yang, antara lain, menargetkan pembangunan 550.000 unit rumah susun sampai 2019, tetapi hingga akhir 2018 baru tercapai 44.893 unit. Begitu pula untuk program rumah khusus ataupun rumah swadaya. Dalam

program penyediaan air bersih, targetnya memperluas cakupan sampai 100 persen, tetapi sampai saat ini baru terealisasi sekitar 72 persen. Demikian pula untuk program sanitasi.

Secara terpisah, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menyatakan, harga lahan menjadi faktor krusial dalam penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat. Di Pulau Jawa, misalnya, biaya lahan berkontribusi paling besar dalam komponen harga rumah. Sementara di luar Jawa, harga material berkontribusi paling besar dalam harga jual rumah subsidi.

Problem lahan dinilai penting dicermati karena sebagian besar pengembang rumah subsidi adalah pengembang kecil dengan modal terbatas. Menurut Soelaeman, mereka tidak bisa mengakuisisi lahan jauh hari sebagaimana dilakukan pengembang besar. Sementara modal mereka kebanyakan dari kredit konstruksi bank dengan bunga komersial. (NAD)

**Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengevaluasi 20 program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Hasilnya, sembilan program diyakini tercapai sampai akhir 2019, sementara delapan program perlu kerja keras untuk menyelesaikannya. Adapun tiga program lain, yakni pengurangan angka kekurangan rumah, penyediaan akses air minum, dan sanitasi, diyakini sulit tercapai antara lain karena kendala mahalannya harga tanah. Program yang dipastikan tercapai antara lain pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan tol, rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan 49 bendungan. Hingga akhir 2018, 3.432 kilometer jalan telah dibangun dari rencana 2.650 km. Untuk jalan tol, 782 km telah beroperasi dari target RPJMN 1.060 km. Bahkan, pemerintah menambah target rencana jalan tol beroperasi menjadi 1.852 km. Demikian pula untuk pembangunan 49 bendungan baru telah menyisakan 9 bendungan yang direncanakan mulai dibangun tahun ini.**

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #RPJMN #FLPP #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia  
#KementerianPPN/Bappenas #Irigasi #SatuJutaRumah #JalanTol #Waduk  
#PelaksanaanProyekNasional #KementerianPUDanPerumahanRakyat #BUMN

# REPUBLIKA

SENIN, 28 JANUARI 2019

## Membangun Proyek untuk Bahan Bakar Gas

**P**T Pertamina bersama PT Bukit Asam menjalin kerja sama dengan perusahaan dari Amerika Serikat, Air Product, untuk membangun pabrik gasifikasi batu bara yang rencananya akan didirikan di Pranap, Riau. Proyek ini diagendakan mulai dibangun pada Maret 2019.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, proyek gasifikasi batu bara ini memiliki dua manfaat. Pertama, dengan adanya pabrik gasifikasi batu bara, akan mengurangi ketergantungan impor elpiji oleh Pertamina. Selama ini 70 persen bahan elpiji yang dibutuhkan Pertamina ditutupi dari hasil impor.

Saat ini Kementerian BUMN telah menurunkan tim untuk mempelajari secara detail mengenai kemungkinan proyek ini bisa memberikan keuntungan untuk substitusi elpiji impor oleh Pertamina. Dengan berbagai teknologi yang mungkin diterapkan pada proyek ini, diharapkan ke depan impor elpiji sudah tidak diperlukan.

Menurut Rini, manfaat gasifikasi ini bukan hanya bagi Pertamina, melainkan juga memberikan dampak baik untuk Bukit Asam. Selama ini

hasil tambang batu bara yang memiliki kalori di bawah 3.000 kerap terbang sehingga menjadi produk yang kurang bernilai. Melalui proyek ini, batu bara yang sebelumnya tidak ditirik bisa terserap secara maksimal.

"Jadi, ini memang teknologi batu bara kita yang kalori rendah kan gak terserap. Nah, ternyata selama ini ada teknologi yang bisa mengubah batu bara ini menjadi gas," ujar Rini.

Direktur Utama PT Bukit Asam, Arvian Arifin, menuturkan, saat ini ketiga perusahaan yang akan bekerja sama membangun proyek tengah menjalankan studi kelayakan. Studi akan dimulai pada Februari dan ditargetkan setelah studi bisa langsung dilakukan peletakan batu pertama.

"Sekarang masih fokus untuk persiapan studi kelayakan. Nanti Pertamina dan Air Product akan melakukan spesialisasi untuk di bagian *upstream* dan *downstream*," ujar Arvian.

Untuk membangun pabrik ini, Arvian menjelaskan, perusahaan membutuhkan waktu 18-24 bulan masa konstruksi. Ia menargetkan pada semester satu tahun ini sudah bisa dimulai masa konstruksi. Maka,



akhir 2021 mendatang pabrik ini sudah bisa beroperasi.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama Pertamina dengan Bukit Asam dan Air Products adalah langkah strategis bagi semua pihak untuk meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional melalui pemanfaatan pengembangan *dimethyl ether* [DME]. *Coal to DME* adalah konversi batu bara yang diubah melalui proses kimia menjadi DME. DME kemudi-

an bisa digunakan sebagai elpiji.

Dia menjelaskan, selama 2017 konsumsi elpiji di Indonesia mencapai 7,11 juta ton. Sebanyak 73 persen dari kebutuhan ini harus dipenuhi dengan mengimpor. Nicke berharap keberadaan proyek gasifikasi menjadi proyek strategis secara nasional yang mampu menurunkan volume impor elpiji.

Sambil menanti pengerjaan pabrik gasifikasi ini rampung, Pertamina akan mulai memperkenalkan produk DME.

Nicke menilai masyarakat perlu mengetahui bahwa ada produk yang bisa mengganti elpiji. Dia berjanji harga gas dari DME ini akan lebih murah dari elpiji yang selama ini beredar di masyarakat.

"Pertamina bisa kasih harga yang lebih murah. Kita akan mulai porsi impor elpiji dengan DME. Kita masih beli DME-nya. Sementara kita bangun proyek ini, kita jajaki beli DME ini. Kita coba tes dan sosialisasikan ini ke masyarakat," ujar Nicke. ■ *edi debbie sutrisno*

**Pemerintah tidak duduk diam untuk mewujudkan konversi BBG. Sehingga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan ketersediaan, alokasi dan mutu (spesifikasi) bahan bakar gas dan PT Pertamina (Persero) siap mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah untuk mengkonversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasi jalan seiring dengan penugasan yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Kemudian Program konversi BBM ke BBG untuk transportasi jalan sangat penting, terutama untuk mengurangi beban subsidi BBM yang selama ini ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, Pertamina sebagai BUMN ikut berkepentingan untuk mendukung kesuksesan program pemerintah tersebut diantaranya dengan mengalokasikan dana internal perusahaan untuk pembangunan SPBG yang**

Hashtag Berita :

#PT.Pertamina #EnergiTerbarukan #Infrastruktur #KetahananEnergiNasional #RPJMN  
#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomiIndonesia #KementerianEnergidanSDM  
#PelaksanaanProyekNasional